



## **Peran Pemerintah Desa Kertajaya Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Masyarakat Multikultural di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis**

**Farhan Wahdatul Huda<sup>1</sup>, Nizar Helmy<sup>2</sup>, Sopyan Saori<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [wahdatullicious362@gmail.com](mailto:wahdatullicious362@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [nizarhelmy@gmail.com](mailto:nizarhelmy@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: [yunsopyansaori@gmail.com](mailto:yunsopyansaori@gmail.com)

### **Abstrak**

*Keragaman agama adalah karakteristik yang menentukan dari banyak komunitas multikultural di seluruh dunia, dan Indonesia, dengan kekayaan budaya dan agamanya, menjadi studi kasus yang patut dicontoh. Dalam konteks ini, Desa Kertajaya di Kabupaten Ciamis menjadi bukti kerukunan dan koeksistensi antar umat beragama. Inti dari koeksistensi ini terletak pada peran penting pemerintah desa dalam membentuk dan membina toleransi beragama. Pemerintah Desa Kertajaya berperan sebagai perantara yang penting antara masyarakat dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah desa merumuskan kebijakan, memfasilitasi dialog antar agama, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk toleransi dan dialog antar agama. Dalam penelitian ini, kami menggali analisis komprehensif tentang kebijakan pemerintah desa terkait toleransi beragama. Selain itu, wawancara dengan perangkat desa, pemuka agama, dan anggota masyarakat memberikan wawasan yang sangat berharga mengenai persepsi mereka terhadap peran pemerintah dalam mengelola keragaman agama.*

**Kata Kunci:** Toleransi, Peran Pemerintah, Desa, Masyarakat Multikultural

### **Abstract**

*Religious diversity is a defining characteristic of many multicultural communities around the world, and Indonesia, with its rich tapestry of cultures and religions, serves as an exemplary case study. Within this context, the Kertajaya Village in Ciamis Regency stands out as a testament to religious harmony and coexistence. At the heart of this coexistence lies the pivotal role of the village government in shaping and fostering religious tolerance. The Kertajaya Village Government serves as a crucial intermediary between the community and higher levels of government. It formulates policies, facilitates interfaith dialogues, and creates an environment conducive to tolerance and interreligious dialogue. Within this study, we delve into a comprehensive analysis of the village government's policies related to religious tolerance.*

*Additionally, interviews with village officials, religious leaders, and community members provide invaluable insights into their perceptions of the government's role in managing religious diversity.*

**Keywords:** *Tolerance, Government Regulation, Village, Multicultural Society*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara dengan beragam budaya, etnis, dan agama, telah lama menjadi teladan bagi keragaman yang harmonis. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok agama yang hidup bersama dalam damai, menjadikannya contoh penting tentang bagaimana keragaman agama dapat dikelola dan dipelihara. Di tengah dinamika keragaman ini, Desa Kertajaya, yang terletak di Kabupaten Ciamis, adalah gambaran nyata dari kerukunan antaragama dalam sebuah lingkungan multikultural yang komprehensif.

Pada saat yang sama, penting untuk mengakui peran sentral pemerintah desa dalam membentuk dan memperkuat sikap toleransi beragama di masyarakat multikultural seperti Desa Kertajaya. Pemerintah desa memiliki peran yang signifikan dalam merancang kebijakan, memfasilitasi dialog antaragama, dan menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi dan kerukunan antaragama. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang peran Pemerintah Desa Kertajaya dalam membantu membangun bangsa dengan meningkatkan toleransi beragama di tengah masyarakat multikultural.

Desa Kertajaya merupakan kasus yang menarik untuk dipelajari karena telah berhasil mempertahankan keragaman agama selama bertahun-tahun. Pemerintah desa, sebagai lembaga yang mendekati masyarakat langsung, memiliki kekuatan untuk mempromosikan dialog antaragama, memberikan dukungan untuk kegiatan yang mendorong pemahaman antaragama, dan merumuskan kebijakan yang mendukung kerukunan beragama. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah desa di Desa Kertajaya berkontribusi pada peningkatan toleransi beragama.

Penelitian ini akan melibatkan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang berkaitan dengan toleransi beragama, serta wawancara dengan para pejabat desa, tokoh agama, dan anggota masyarakat untuk memahami persepsi mereka tentang peran pemerintah desa dalam mengelola keragaman agama. Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan dan inisiatif lokal dapat memengaruhi sikap dan perilaku toleransi beragama di Desa Kertajaya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan penting bagi pemangku kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, tentang bagaimana meningkatkan peran pemerintah desa dalam mempromosikan toleransi beragama sebagai bagian integral dari membangun bangsa yang kuat dan harmonis. Dengan

demikian, penelitian ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas dalam konteks pemeliharaan keragaman agama dan kerukunan nasional di Indonesia.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat untuk memenuhi tugas dari kampus yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh tiga kelompok di wilayah Desa Kertajaya. Pengabdian masyarakat ini berbasis sistem pemberdayaan masyarakat (SISDAMAS) yang disusun oleh para ahli Tim Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Perencanaan program kerja ini dibuat dengan berdasarkan pada siklus KKN SISDAMAS Moderasi Beragama yang terdiri dari empat siklus. Siklus pertama yaitu sosialisasi awal, rebug warga, dan refleksi sosial, siklus kedua yaitu pemetaan sosial, siklus ketiga yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program, serta siklus keempat yaitu pelaksanaan program dan monitoring evaluasi (Monev).

Penelitian berbasis pemberdayaan masyarakat yang dipadukan dengan penelitian kualitatif deskriptif ini yaitu peneliti berusaha mengungkapkan cara masyarakat Desa Kertajaya dalam mengembangkan sikap moderat melalui toleransi dalam beragama. Kami pun terjun langsung ke lapangan dan berbaur dalam kegiatan masyarakat khususnya dalam kegiatan beragama dan kegiatan sosial untuk mengetahui sejauh mana pemahaman toleransi beragam bagi masyarakat Dusun Susuru. Jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu untuk mengungkapkan makna di balik peristiwa atau kegiatan (Moleong, 2017, p. 7).

Metode yang digunakan dalam melaksanakan pengabdian KKN ini terdiri dari observasi yang bertujuan untuk mengetahui adanya berbagai macam agama di Desa Kertajaya, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di desa Kertajaya. Seperti perangkat desa, pemuka agama, dan beberapa masyarakat setempat setempat untuk mendapatkan data kegiatan keagamaan, dan ikut serta dalam kegiatan keagamaan sebagai upaya memperkuat kerukunan beragama, serta studi literature yang bertujuan untuk memperkuat hasil kegiatan.

## **C. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pelaksanaan yang dilakukan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Kertajaya Dalam Meningkatkan Toleransi Beragama Masyarakat Multikultural di Desa Kertajaya Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis yaitu dengan ikut andil dalam kegiatan pemerintah desa dalam melayani masyarakat, juga mewawancarai beberapa peringкта desa. Tidak lupa mencari feedback masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pengajian, perayaan hari besar setiap agama, dan mewawancarai para tokoh agama secara khusus. Selain itu, untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Dusun Susuru, kami melakukan pengamatan kegiatan sehari-hari dalam masyarakat



**Gambar.1** wawancara perangkat desa mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan toleransi di Desa kertajaya

Kemudian kami mengikuti kegiatan ibadah Kepercayaan Sunda Wiwitan, unruk lebih mengenal bagaimana praktek ibadah yang mereka lakukan. Serta mewawancarai mengenai pemerintah bagi keberlangsungan ibadah agama mereka.



**Gambar.2** kegiatan keagamaan aliran kepercayaan sunda wiwitan

Kami juga melakukan dialog lintas agama dan wawancara kepada pengurus Gereja Katolik Santo Simon.



**Gambar.3** Dialog lintas agama dan wawancara kepada Paulus Anang selaku pengurus Gereja Katolik Santo Simon

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Konsep Toleransi Beragama**

Toleransi beragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan keyakinan antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Toleransi beragama didasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi atau diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Toleransi beragama juga mencakup keberanian untuk berdialog dan memahami perbedaan agama dan keyakinan serta menumbuhkan sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama dan budaya dalam masyarakat

Sangatlah penting untuk terus memperkuat dan mengembangkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keragaman agama dan budaya. Dengan demikian, setiap orang dapat membangun lingkungan yang inklusif, harmonis, dan damai bagi semua individu. Melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kegiatan sosial, semua individu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan rasa saling pengertian di antara umat beragama dan berbudaya. Menerima dan menghargai perbedaan dapat membangun fondasi yang kuat untuk memperkuat ikatan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan sejahtera bagi semua warga negara.

Setiap orang dapat menciptakan ruang yang aman dan inklusif untuk semua melalui langkah-langkah konkret, seperti memperkenalkan pelajaran tentang keragaman agama dan budaya dalam pendidikan, mengadakan pertemuan lintas agama untuk berbagi pengalaman dan dan pemahaman, serta menyelenggarakan acara dan festival yang merayakan yang merayakan keberagaman. Mempromosikan dialog antar umat beragama dan membangun jembatan komunikasi yang kuat juga penting agar setiap individu dapat merasa dihargai dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Selain itu, perlu untuk mengadopsi kebijakan publik yang mendukung pluralisme dan melindungi hak-hak semua individu tanpa memandang agama atau budaya mereka. Penting untuk melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya-upaya ini sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendidik dan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghargai keragaman agama dan budaya juga harus dimulai sejak dini, melalui pendidikan dalam keluarga. Mendidik anak tentang nilai-nilai saling menghargai, empati, dan keadilan akan membantu membentuk generasi yang lebih terbuka dan menerima perbedaan. Dengan tekad yang kuat dan upaya yang terus menerus, hal ini dapat menciptakan masyarakat inklusif yang menghargai keragaman agama dan budaya. Ketika individu dapat hidup bersama secara harmonis, saling mendukung, dan saling melengkapi satu sama lain, maka akan mencapai kemajuan dan kemakmuran sebagai bangsa.

Konsep toleransi beragama juga mempertimbangkan pentingnya menghindari sikap fanatisme agama dan intoleransi yang dapat memicu konflik dan ketegangan sosial di masyarakat (Ishak, Ranaivo, & Manitra, 2022).

Oleh karena itu, toleransi beragama harus dihayati dan dipraktikkan oleh setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi beragama yang kuat (Eko & Putranto, 2019). Hal ini dapat dicapai melalui beberapa upaya, antara lain: *pertama*, edukasi dan sosialisasi. Pendidikan dan sosialisasi yang tepat dan berkesinambungan mengenai pentingnya toleransi beragama dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai keragaman agama dan budaya di Indonesia. *Kedua*, membangun dialog dan kerjasama. Membangun dialog dan kerja sama antar agama dan kelompok dan kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, dan kegiatan sosial bersama. *Ketiga*, menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan agama dan budaya serta saling menghormati antar kelompok dapat membantu mendorong toleransi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi persamaan hak dan perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa memandang agama, ras, atau kelompok sosial. *Keempat*, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan antar kelompok agama dan budaya melalui interaksi yang positif dan produktif dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik antar kelompok. *Kelima*, mendorong partisipasi. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya memperkuat toleransi beragama. toleransi beragama dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan bersama, kegiatan sosial, dan dan partisipasi dalam program-program pemerintah untuk memperkuat toleransi beragama.

Di Indonesia, terutama di Desa Kertajaya toleransi beragama merupakan nilai fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang tercermin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, meskipun terdapat perbedaan agama dan budaya, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain (Karimullah, 2022b). Kerukunan dan saling menghormati adalah bagian penting dari toleransi beragama. Toleransi beragama berarti mampu menghormati perbedaan agama dan kepercayaan agama dan kepercayaan orang lain tanpa menghakimi atau merendahkan. Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, toleransi beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai agama dan komunitas yang berbeda.

Dalam menjalankan konsep toleransi beragama, penting untuk memahami bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, saling menghormati dan menjunjung tinggi keadilan bagi semua individu tanpa diskriminasi sangat diperlukan. diperlukan. Dalam membangun sikap toleransi beragama yang harmonis, penting juga penting juga untuk memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik masyarakat.

sosial, budaya, dan konteks politik masyarakat. Pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat harus harus bekerja sama untuk membentuk kebijakan dan program yang mempromosikan toleransi beragama dan meminimalkan potensi konflik. Dengan demikian, lingkungan yang harmonis dan dan damai tercipta di antara kelompok-kelompok agama dan masyarakat.

Kelompok agama dan masyarakat yang berbeda dapat merujuk pada kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, suku, ras, dan budaya. Di Desa Kertajaya, berbagai agama, seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan aliran kepercayaan penghayat sunda wiwitan. Masing-masing kelompok agama dan masyarakat tersebut memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda, dan perbedaan ini harus dihormati dan diakui keberadaannya. Dalam konteks keberagaman agama dan sosial di Indonesia, penting untuk membangun sikap toleransi beragama yang menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Toleransi beragama harus diterapkan secara inklusif, yaitu mempertimbangkan semua agama dan masyarakat tanpa diskriminasi atau pilih kasih terhadap kelompok tertentu. Hal ini akan memperkuat persatuan di Desa Kertajaya dan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai yang harmonis dan damai di antara berbagai kelompok agama dan masyarakat (Habibah & Setyowati, 2021).

Menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di antara berbagai kelompok dan komunitas agama merupakan tujuan utama dari pembangunan toleransi beragama. Kehidupan yang rukun dan damai dapat tercipta jika setiap individu atau kelompok memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi untuk menghargai perbedaan, menghindari konflik, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di antara berbagai kelompok agama dan masyarakat. Pemerintah harus berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan yang dapat memfasilitasi terciptanya toleransi beragama dan meminimalisir konflik antar umat beragama. Sementara itu, para pemuka agama dapat memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya toleransi beragama dan mengembangkan dialog antar umat beragama untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar umat beragama.

Masyarakat juga dapat secara aktif membangun toleransi beragama dengan menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan di antara berbagai kelompok dan komunitas agama (Wibisono, Louis, & Jetten, 2019). Untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di antara berbagai kelompok dan komunitas agama, penting juga untuk memperhatikan aspek sosial, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi dinamika keberagaman di masyarakat. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, diharapkan akan tercipta lingkungan yang rukun dan damai yang harmonis dan damai di antara berbagai kelompok dan komunitas agama.

Kelompok agama adalah sekelompok orang yang memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang sama. Dalam masyarakat multikultural seperti di Desa Kertajaya, berbagai kelompok agama seperti Islam, Katolik, Protestan, dan aliran kepercayaan penghayat sunda wiwitan. Sementara itu, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama di suatu wilayah atau daerah dengan sesuatu yang sama mengenai budaya, adat istiadat, norma, dan nilai-nilai sosial. Masyarakat juga terdiri dari berbagai kelompok, seperti kelompok agama, kelompok etnis kelompok sosial ekonomi, dan kelompok profesi.

Dalam toleransi beragama, kelompok dan komunitas agama yang berbeda harus hidup bersama secara harmonis dan saling menghormati satu sama lain, terlepas dari perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan sebagai bagian dari keragaman yang ada di masyarakat, dan menghindari diskriminasi atau tindakan intoleransi yang dapat memicu konflik antar kelompok agama dan masyarakat. Pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun toleransi dan kerukunan antar kelompok dan komunitas agama.

Konflik antar kelompok agama dapat dipicu oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan, perbedaan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial, serta adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam hubungan antar kelompok. Selain itu, faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan lingkungan juga dapat memicu konflik antar kelompok agama. Pemicu konflik antar kelompok agama dapat berupa tindakan intoleransi yang dilakukan oleh kelompok tertentu, seperti diskriminasi, penghinaan, persekusi, dan kekerasan. Selain itu, berita bohong atau hoaks. Selain itu, berita bohong atau hoaks yang berkaitan dengan agama juga dapat memicu konflik antar kelompok. Untuk mencegah terjadinya konflik antar kelompok agama, diperlukan upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya toleransi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat secara keseluruhan perlu bekerja sama untuk mengatasi perbedaan dan mencegah tindakan intoleransi. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk memperkuat hukum dan sistem yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga sehingga semua kelompok dan komunitas agama merasa dihargai dan diakui dalam lingkungan yang inklusif.

Lingkungan yang inklusif adalah lingkungan yang dapat memfasilitasi keberagaman dan mengakomodasi kebutuhan semua individu dan kelompok dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Dalam konteks Toleransi Beragama, lingkungan yang inklusif harus mengakomodasi keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda. Dalam lingkungan yang inklusif, semua individu dan kelompok harus memiliki hak yang sama dan diakui keberadaannya tanpa diskriminasi atau marginalisasi. Semua individu dan kelompok juga harus diberi kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa

diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, perlu adanya kesadaran toleransi dan kerukunan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan masyarakat, dan pemuka agama harus bekerja sama untuk membangun lingkungan yang inklusif dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama, mengakomodasi perbedaan, dan menentang diskriminasi dan intoleransi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti dialog antar kelompok agama, program sosial, dan program pendidikan.

### **Kebijakan Pemerintah Desa Kertajaya dalam Mendorong Toleransi Beragama**

Pemerintah Desa Kertajaya telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mendorong toleransi beragama di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah yang mendorong toleransi beragama, antara lain: kebijakan keberagaman. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempromosikan keberagaman dan persatuan nasional (Hefner, 2021). Kebijakan tersebut terutama menyangkut hak asasi manusia, mengakui dan melindungi hak-hak minoritas, dan dukungan terhadap praktik-praktik keagamaan dan adat istiadat setempat. Kedua, integrasi Pendidikan Agama. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah untuk mempromosikan toleransi beragama adalah dengan memperkuat pendidikan agama di sekolah. Pemerintah telah mengintegrasikan pelajaran agama dengan pelajaran sosial, budaya, dan sosial, budaya, dan sejarah sehingga siswa dapat memahami nilai-nilai agama dan toleransi.

Ketiga, Program Toleransi Umat Beragama. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program untuk mempromosikan toleransi beragama, seperti pelatihan lintas agama dan budaya, dialog, dan kerja sama antar kelompok agama dalam kegiatan sosial dan budaya. Keempat, Penegakan Hukum. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan beragama, serta penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan kekerasan berbasis agama (Ishak et al., 2022). Kelima, Kebijakan Pembangunan. Pemerintah juga memperhatikan pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial di daerah-daerah dengan keragaman agama dan budaya yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kohesi sosial dan mendorong toleransi antar kelompok. Untuk mendorong toleransi beragama, pemerintah harus memperkuat dan meningkatkan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif. Pemerintah juga harus mengevaluasi dan menilai kebijakan-kebijakan ini untuk menentukan seberapa berhasil mendorong toleransi beragama di masyarakat.

Toleransi beragama dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama yang sangat signifikan (Radjab, Genda, & Abdullah, 2020). Masyarakat Desa Kertajaya

sendiri terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan, seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan aliran kepercayaan penghayat sunda wiwitan. Terlepas dari perbedaan agama dan kepercayaan, masyarakat Desa kertajaya memiliki budaya toleransi yang kuat. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kegiatan keagamaan, upacara adat, dan kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh di mana masyarakat Indonesia dari berbagai agama hidup hidup rukun, saling menghormati, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar.4** Pengurus gereja Santo Simon susuru, Desa Kertajaya ikut andil dalam acara pemakaman masyarakat muslim

Menghargai keragaman agama merupakan hal yang penting dalam membangun kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Berikut adalah beberapa cara untuk menghormati keragaman agama: pertama, menghormati keyakinan orang lain. Penting untuk menghormati dan mengakui hak setiap individu untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya sendiri. Jangan mengejek, merendahkan, atau memaksakan pandangan agama tertentu kepada orang lain. agama tertentu kepada orang lain. Kedua, buka pikiran Anda. Bukalah pikiran Anda terhadap berbagai pemahaman dan perspektif yang berbeda tentang agama. Jangan mempersempit pandangan Anda hanya pada keyakinan atau praktik agama Anda sendiri. Ajukan pertanyaan, pelajari, dan mencari informasi untuk memperluas pengetahuan Anda tentang agama lain. Ketiga, membangun dialog dan komunikasi yang baik. Ajaklah orang-orang dari agama yang berbeda untuk agama yang berbeda untuk berbicara, berbagi pengetahuan, dan saling memahami perspektif agama masing-masing. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan saling bertukar informasi dapat memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan agama.

Keempat, berpartisipasi dalam perayaan keagamaan. Berpartisipasi dalam perayaan keagamaan orang lain. Menghadiri acara keagamaan seperti perayaan hari raya, ibadah, atau upacara dapat menunjukkan apresiasi dan kepedulian terhadap praktik keagamaan mereka. Kelima, menjaga sikap saling menghormati dan toleransi. Menghindari diskriminasi, prasangka, atau intoleransi terhadap agama lain adalah hal

yang penting. Menghargai perbedaan dan menghormati hak-hak beragama orang lain merupakan tindakan penting dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan. Keenam, membangun persahabatan antar umat beragama. Jalinlah persahabatan dan hubungan yang baik dengan orang-orang yang berbeda agama. Melalui interaksi sosial yang positif, membangun pemahaman, mengatasi stereotip dan memperkuat ikatan agama. Ketujuh, mempromosikan dialog antaragama. dialog antar agama. Mengajak orang untuk terlibat dalam dialog antaragama dan kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan toleransi. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, seminar, lokakarya, atau kegiatan lintas agama lainnya. Dengan menghormati keragaman agama, setiap orang dapat menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan berkomitmen terhadap perdamaian antaragama.

Pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat toleransi beragama di Indonesia dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang agama dan kepercayaan lain. Pemerintah dan masyarakat dapat mengadakan program edukasi atau seminar tentang agama dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman dan mengurangi stereotip atau prasangka negatif terhadap agama atau kepercayaan yang berbeda. Kemudian, membangun kerja sama antar agama dan kepercayaan. Tokoh masyarakat dan agama dapat bekerja sama dalam kegiatan sosial atau keagamaan yang positif, seperti kegiatan kemanusiaan kerja bakti, atau perayaan keagamaan bersama. Hal ini dapat membantu membangun rasa saling percaya dan kerja sama antar agama dengan mendorong dialog dan diskusi terbuka antar agama dan kepercayaan. Pemerintah dan masyarakat dapat mengadakan forum atau dialog terbuka yang mempromosikan pendekatan inklusif dan menghormati keragaman. Hal ini dapat membantu membangun rasa saling menghormati dan memperdalam saling menghormati dan memperdalam pemahaman antar agama.

Meningkatkan akses terhadap informasi yang akurat dan positif tentang agama dan keyakinan juga penting untuk memperkuat toleransi beragama di Desa Kertajaya. Pemerintah dan media massa dapat menyajikan informasi yang akurat dan positif yang akurat dan positif tentang agama dan kepercayaan. Hal ini dapat membantu meminimalkan penyebaran informasi yang salah atau negatif tentang agama atau kepercayaan tertentu yang dapat negatif yang dapat menimbulkan konflik. Selain itu, mengadopsi kebijakan yang inklusif dan menghargai keberagaman juga dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan multikulturalisme dan menghargai keberagaman agama dan agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman dan budaya dan budaya toleransi beragama di Indonesia. Memperkuat toleransi beragama di Indonesia memungkinkan orang untuk hidup bersama dalam harmoni dan damai meskipun meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Hal ini dapat membantu memperkuat persatuan bangsa dan mempromosikan Indonesia sebagai negara yang majemuk dan inklusif.

Memperkuat toleransi beragama di Desa Kertajaya dapat membantu memajukan Indonesia sebagai negara yang majemuk dan inklusif. Hal ini dikarenakan keragaman agama dan budaya di Indonesia sangat besar, sehingga toleransi menjadi kunci penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dengan memperkuat toleransi beragama, masyarakat Desa Kertajaya dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati satu sama lain tanpa adanya konflik atau diskriminasi berdasarkan agama. Hal ini juga dapat membantu memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kemajuan Indonesia sebagai negara maju dan inklusif yang siap bersaing di tingkat global.

### **Efektivitas Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mempromosikan Toleransi Beragama**

Efektivitas kebijakan dapat diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mahrus & Karimullah, 2022). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan, antara lain desain kebijakan, implementasi, dan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil kebijakan. Efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh desain yang baik. Kebijakan yang jelas, terukur, dan memiliki tujuan yang spesifik akan memiliki peluang yang lebih tinggi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, juga cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan yang luas. Proses implementasi kebijakan

Proses implementasi kebijakan juga memegang peranan penting dalam menentukan efektivitasnya. Kebijakan yang tidak diimplementasikan dengan baik atau tidak mendapat dukungan yang memadai dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penting untuk memastikan tersedianya sumber daya yang cukup, kapasitas administrasi yang memadai, serta adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif selama proses implementasi.

Selain itu, lingkungan eksternal juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Sebagai contoh, perubahan ekonomi, politik, atau sosial dapat mempengaruhi hasil kebijakan. Selain itu, partisipasi dan dukungan masyarakat juga merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan. Kebijakan yang mendapat dukungan luas dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum cenderung lebih berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengukuran efektivitas kebijakan dapat menggunakan berbagai metode, seperti evaluasi kuantitatif dan kualitatif, analisis dampak, serta pengumpulan data dan informasi yang relevan. Penting untuk melakukan evaluasi secara terus menerus untuk memantau kemajuan kebijakan, mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul, dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut.

Efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong toleransi beragama dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor berikut: *pertama*, kesesuaian dengan tujuan. Keberhasilan kebijakan dan program dalam mendorong toleransi beragama dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan dan program tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wijaya Mulya & Aditomo, 2019). Tujuan ini harus jelas dan terukur, misalnya dalam mengurangi intoleransi atau meningkatkan partisipasi lintas agama dalam kegiatan sosial. *Kedua*, eksekusi dan implementasi. Efektivitas kebijakan dan program juga bergantung pada pelaksanaan dan implementasinya. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dijalankan dengan baik, apakah tersedia sumber daya yang memadai, kejelasan prosedur, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. *Ketiga*, Partisipasi Masyarakat. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memperkuat toleransi beragama. Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program, perlu dilihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan. Jika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan, maka peluang keberhasilan akan lebih besar. keberhasilan kebijakan akan lebih besar.

*Keempat*, Dampak Sosial. Evaluasi efektivitas kebijakan dan program juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang dihasilkan. Apakah kebijakan dan program tersebut telah mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif, harmonis, dan saling menghormati? Apakah terjadi peningkatan kesadaran dan pemahaman akan nilai-nilai toleransi beragama di masyarakat? Kelima, evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan program harus menjadi proses yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan hambatan dalam implementasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Sebagai kesimpulan, evaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam toleransi beragama perlu mempertimbangkan tujuan yang ditetapkan, pelaksanaan dan implementasi, partisipasi masyarakat, dampak sosial yang dihasilkan, serta evaluasi dan masyarakat, dampak sosial yang dihasilkan, dan upaya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Perbaikan berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam memperkuat toleransi beragama. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan adalah melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program kebijakan dan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan, seperti survei, wawancara, atau analisis statistik. Pemantauan dan evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kelemahan, kendala, dan keberhasilan kebijakan dan program yang ada. Kemudian, pemerintah menerima masukan dan umpan balik dari masyarakat. Penting untuk melibatkan masyarakat, kelompok agama, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan masukan dan umpan balik terkait kebijakan dan program

yang telah dilaksanakan. yang telah dilaksanakan. Dengan mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif mereka, pemerintah dapat memperbaiki kebijakan dan program yang ada dan mengidentifikasi yang ada dan mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki.

Penyesuaian kebijakan dan program juga perlu diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan program yang ada berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik. Penyempurnaan dapat dilakukan dengan memperbaiki aspek-aspek yang tidak efektif, mengubah strategi pelaksanaan, atau mengadopsi pendekatan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan. kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok agama, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mengembangkan inisiatif dan program-program untuk memperkuat toleransi beragama. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan memperluas cakupan implementasi kebijakan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk dilibatkan dalam isu ini. Perbaikan yang berkesinambungan juga dapat dilakukan melalui upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat masyarakat akan pentingnya toleransi beragama. Pendidikan Inklusif, kurikulum yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, dan kampanye-kampanye penyadaran dapat membantu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menghargai perbedaan agama. perbedaan. Perbaikan yang berkelanjutan harus menjadi komitmen jangka panjang pemerintah untuk mempromosikan toleransi beragama. Melalui pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan yang berkelanjutan, kebijakan dan program dapat menjadi lebih efektif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat toleransi beragama di Desa Kertajaya.

Agar program lebih efektif dalam memperkuat toleransi beragama, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah: *pertama*, penetapan tujuan yang jelas. Program harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur dalam mempromosikan toleransi beragama. Tujuan-tujuan ini harus dapat diukur dan dievaluasi untuk menentukan bagaimana program mencapai hasil yang diharapkan. *Kedua*, Analisis Kebutuhan. Melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat terkait toleransi beragama. Hal ini melibatkan pemahaman tentang tantangan dan masalah yang dihadapi masyarakat dalam membangun toleransi beragama dan mengidentifikasi kelompok sasaran yang paling membutuhkan perhatian. yang paling membutuhkan perhatian. *Ketiga*, partisipasi aktif masyarakat. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Mendengarkan pendapat dan perspektif masyarakat akan membantu memastikan bahwa program mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, serta meningkatkan tingkat penerimaan dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan program. *Keempat*, pendekatan lintas sektor. Mengadopsi pendekatan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan,

masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Kerja sama antar sektor akan memperluas jangkauan program dan memungkinkan sumber daya yang lebih besar untuk ditempatkan dalam upaya memperkuat toleransi beragama.

*Kelima*, evaluasi dan pemantauan rutin. Melakukan evaluasi dan pemantauan rutin evaluasi dan pemantauan program secara berkala untuk menilai efektivitasnya. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengumpulan data, survei, wawancara, dan pemantauan lapangan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan program serta menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang. Keenam, pengembangan kapasitas. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti fasilitator, guru, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka akan memperkuat kemampuan mereka untuk mempromosikan toleransi beragama dan menyelesaikan konflik. Ketujuh, penyebaran informasi dan kampanye publik. Melakukan sosialisasi dan kampanye publik. Informasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pentingnya toleransi beragama. Hal ini dapat dilakukan melalui media massa, media sosial, materi pendidikan, dan kegiatan masyarakat yang membahas isu-isu toleransi beragama. Dengan mengadopsi pendekatan holistik dan multi-pemangku kepentingan, program-program tersebut dapat lebih efektif dalam memperkuat toleransi beragama di Indonesia. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dan perbaikan untuk meningkatkan dampak positif program.

## **E. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pemerintah dalam mendorong toleransi beragama dalam masyarakat multikultural, maka dapat diajukan beberapa mendorong toleransi beragama dalam masyarakat multikultural, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi, antara lain: *pertama*, Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama dan manfaatnya dalam masyarakat multikultural. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program pendidikan, dan pelatihan bagi para pemimpin agama dan pendidik untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman agama. *Kedua*, Kebijakan Inklusif dan Perlindungan Hukum. Pemerintah harus mengadopsi kebijakan inklusif yang mengakui dan melindungi hak-hak beragama setiap individu. Hal ini mencakup kebebasan beragama, perlindungan dari diskriminasi, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak beragama. Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme yang efektif bagi individu untuk melaporkan kasus-kasus intoleransi atau diskriminasi agama. *Ketiga*, Promosi Dialog Antar Agama. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog antara para pemimpin agama dan umat beragama yang berbeda. Dialog ini harus mencakup pemahaman yang lebih baik tentang agama-agama yang berbeda, resolusi konflik, dan upaya bersama untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antaragama. *Keempat*,

Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan. Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk mempromosikan toleransi beragama. Kolaborasi ini dapat berupa kegiatan sosial, budaya, atau kemanusiaan yang melibatkan berbagai komunitas agama untuk membangun pemahaman dan kepercayaan antar agama. *Kelima*, Pemantauan dan Evaluasi. Pemerintah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program yang mempromosikan toleransi beragama. Hal ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan serta memungkinkan penyesuaian dan perbaikan terhadap strategi yang diimplementasikan. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat membantu pemerintah dalam mempromosikan toleransi beragama dalam masyarakat multikultural. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi strategi ini harus komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, komunitas agama, organisasi masyarakat sipil, dan individu-individu dalam masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan individu-individu dalam masyarakat.

Peran pemerintah yang efektif dalam mempromosikan toleransi beragama dalam masyarakat multikultural melibatkan kebijakan inklusif, pendidikan multikultural, dialog antar agama, penegakan hukum, dan kerja sama antar lembaga. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, masyarakat multikultural dapat hidup secara harmonis, saling menghormati, dan membangun kehidupan beragama yang damai. Kehidupan beragama yang damai mengacu pada situasi di mana individu-individu dari berbagai agama dapat hidup bersama secara harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama tanpa konflik atau ketegangan yang berkaitan dengan perbedaan agama. Kehidupan beragama yang damai membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik individu, komunitas, organisasi keagamaan, maupun pemerintah. Dengan membangun pemahaman, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kehidupan beragama yang damai dapat diwujudkan dalam masyarakat multikultural.

Mewujudkan kehidupan beragama yang damai dalam masyarakat multikultural melibatkan menghormati keragaman dan mempromosikan kerukunan antar agama. Dalam masyarakat multikultural, upaya bersama dari individu, kelompok agama, pemerintah dan lembaga-lembaga sosial untuk mempromosikan toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar kerukunan antar agama akan memainkan peran penting dalam mewujudkan kehidupan beragama yang damai dan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Kehidupan beragama yang damai dan harmonis mengacu pada situasi dimana individu-individu yang berbeda agama hidup rukun, saling menghormati menghormati satu sama lain, dan bekerja sama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Melalui komitmen bersama individu, kelompok agama, pemuka agama, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan, kehidupan beragama yang damai dan harmonis dapat diwujudkan damai dan harmonis di tengah masyarakat yang multikultural.

## F. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sebagai penulis sampaikan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Bapak Cucu Setiawan, S.Psi., M.Ag yang telah membimbing kami selama KKN, kemudian juga kepada beberapa pihak dari perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat yang telah bersedia kami wawancarai untuk kami menggali informasi. Tidak lupa juga kepada teman-teman yang selalu memberamai dan memberikan semangat dalam proses penyusunan artikel penelitian ini. Saya ucapkan terimakasih juga kepada bapak H. Kurdi yang selalu memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa sehingga bisa membangun karakter bagi kami untuk bisa sampai menyelesaikan perjalanan KKN kami sampai dengan kepenyusunan artikel ini.

## G. DAFTAR PUSTAKA

- Damirovich, M. R., Ibragimovich, T. I., & Sattarovich, A. U. (2022). The role of spiritual and educational events in promoting the ideas of religious tolerance and international health. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 970–972.
- Eko, B. S., & Putranto, H. (2019). The role of intercultural competence and local wisdom in building intercultural and inter-religious tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, 48(4), 341–369.
- Gianni, M. (2020). Multiculturalism and Political Integration: The Need for a Differentiated Citizenship? In *Rethinking Nationalism and Ethnicity* (pp. 127–142). Routledge.
- Habibah, S. M., & Setyowati, R. N. (2021). Awareness of Religious Tolerance for Millennial Youth in Surabaya in the Dynamics of Diversity. *International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 612–616. Atlantis Press.
- Haryanto, S. (2019). The sociological context of religion in Indonesia. In *Research in the Social Scientific Study of Religion, Volume 30* (pp. 67–102). Brill.
- Hefner, R. W. (2021). Islam and Institutional Religious Freedom in Indonesia. *Religions*, 12(6), 415. <https://doi.org/10.3390/rel12060415>
- Ilyasin, M., & Tohet, M. (2020). Multicultural education in a religious life: Developing harmony among religions in southeast asia. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, August*, 3791–3801.
- Ishak, N. (2022). Religious Tolerance in the Constitution and Guarantees for the Protection of Human Rights. *Jurnal Scientia Indonesia*, 8(1), 53–70.

- Ishak, N., Ranaivo, R., & Manitra, M. (2022). Constitutional Religious Tolerance in Realizing the Protection of Human Rights in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1).
- Japar, M., Sahid, K., & Fadhillah, D. N. (2019). Social tolerance in multi-religious states: A case study in cigugur society, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(7).
- Karimullah, S. S. (2022a). Moral Values Internalization of Pancasila in the Education System: A Response to the Problems of Radicalism. *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)*, 2(01), 32–38.
- Karimullah, S. S. (2022b). Religion and State in the Islamic Political Paradigm in Indonesia Perspective of Prof. Kamsi. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 22(1), 53–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12648>
- Karimullah, S. S., Faizin, M., & Islami, A. (2023). Internalization of Islamic Moderation Values in Building a Civilization of Love and Tolerance. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 94–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v9i1.6345>
- Mahrus, M., & Karimullah, S. S. (2022). Analysis of Educational Policy in the Framework of Learning Efficiency and Effectiveness. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(02), 1–17.
- Purwani, T., & Arvianti, I. (2020). Constructing harmonization of multicultural society. *Social Science Learning Education Journal*, 5(06), 157–170.
- Radjab, M., Genda, A., Haris, A., & Abdullah, S. (2020). Religious tolerance practices: A case study of family with different religions in toraja ethnicity south sulawesi province, Indonesia. *International Journal of Management*, 11(5).
- Wibisono, S., Louis, W. R., & Jetten, J. (2019). A multidimensional analysis of religious extremism. *Frontiers in Psychology*, 10, 2560.
- Wijaya Mulya, T., & Aditomo, A. (2019). Researching religious tolerance education using discourse analysis: a case study from Indonesia. *British Journal of Religious Education*, 41(4), 446–457.